

**KEPENTINGAN INDONESIA MEMBERLAKUKAN KEBIJAKAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR
PRODUK BAJA GALVALUME (STUDI KASUS: IMPOR BAJA INDONESIA
VIETNAM)**

Name: Agustian

(agustian0899@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Dr. Umi O Retnaningsih, MA

Bibliografi: 14 Jurnal, 5 Buku, 2 Skripsi, 17 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax 0761-63277

Abstract

This study explains that there is a surge in imports of Indonesian galvalume steel products from several market shares in the main import origin countries. The increase occurred in 2012 when compared to 2008 it was noted that the most galvalume steel products were imported from Vietnam with a share of 60.04%. The increase in market share for Vietnam was 11.45%. With the surge in imports, there is a threat of serious losses experienced by the Indonesian galvalume steel industry. Therefore, Indonesia enforces a policy of protectionism against imports of galvalume steel. The author discusses the interests of Indonesia in imposing a Safeguard Measures Import Duty (BMTP) Policy on the Import of Galvalume Steel Products (case study: Indonesia-Vietnam Steel Imports).

The perspective used in this study is Markantilism and uses the level of analysis of the nation state. This research uses the theory of Protectionism that is able to explain the country's strategy in protecting the domestic galvalume steel industry from the threat of imported steel and overcome the problem by enacting the Safeguards Policy.

This research shows that the Indonesian government's Safeguards policy has a in protecting the domestic galvalume steel industry from the flood of imported steel that causes a serious threat of harm to industries that produce similar goods.

Keywords: BMTP, National Interest, Galvalume, Security Measures, Protectionism.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang banyak melakukan pembangunan disegala bidang membutuhkan industri manufaktur seperti besi baja yang merupakan peran penting dalam penyediaan bahan baku untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi, ataupun produksi barang modal seperti mesin pabrik dan material pendukung serta suku cadangnya, juga alat-alat transportasi, alat otomotif, hingga persenjataan sehingga untuk mendorong kebutuhan industri nasional dalam negeri, dari segi ekonomi dan politik. Keberadaan industri baja mendukung terciptanya industri-industri lokal yang menjadi industri utama dalam negeri dan salah satu termasuk ekonomi unggulan indonesia sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan infrastruktur, salah satunya besi baja.¹

Indonesia merupakan salah satu konsumen terbesar sekaligus produsen bagi industri baja. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, industri logam dasar besi dan baja nasional tumbuh sebesar 12,74% pada semester I tahun 2012 dan konsumsi baja di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 12,54 juta ton dan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.²

Tahun 2008 permintaan pasar domestik akan produk baja canai lantain atau baja *galvalume* mengalami peningkatan dimana kebutuhan akan baja ringan sebagai bahan dasar konstruksi bangunan semakin diminati. Sebagian besar kebutuhan bahan

baku akan baja jenis *galvalume* dipenuhi melalui impor dimana industri dalam negeri baru mampu memproduksi 20.721 Ton dengan tren 30% dari kebutuhan nasional. Sedangkan volume impor baja *galvalume* periode 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan impor secara absolut dari 79.279 ton hingga 251.315 dengan tren sebesar 42%.

Tabel 1.1 Jumlah Impor Produk Baja Galvalume

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah (Ton)	79.27	50.48	123.79	161.75	251.3
Perubahan (%)		(36)	145	31	55
Tren (%)	42				

Sumber: *KPPI*

Nilai impor baja galvalume pada tahun 2009 dengan total impor sebesar 50.482 Metrik Ton adalah sebesar US\$ 41,7 juta. Pada tahun 2010 meningkat secara signifikan menjadi 123.794 Metrik Ton dengan nilai US\$ 111, 8 juta. Pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 161.759 Metrik Ton dengan nilai US\$ 161,8 juta. Peningkatan terjadi lagi pada tahun 2012 dengan total impor mencapai 251.315 Metrik Ton dengan nilai US\$ 231,9 juta.³

Tabel 1.2 Pangsa Pasar Tiga Negara Asal Impor Utama

Uraian	Pangsa Pasar 2008 (%)	Pangsa Pasar 2012 (%)
Vietnam	48,59	60,04
Taiwan	6,66	21,00
Korea Selatan	11,67	96,26
Jumlah	66,92	96,26

Sumber: *KPPI*

³ Kementerian Perindustrian, "Data Ekspor Impor Besi Baja Code HS 7210 Periode 2009-2018", <https://kemenperin.go.id/jawaban.php?id=38767-37478>, Diakses pada 30 November 2020, 20:38 WIB

¹ Suhud Widiyanto, 2019 "Peramalan nilai impor besi baja indonesia 2008-2017 dengan model arima" Jurnal Manajemen, Vol. 11 (2).

² Ade Maryanto, 2020 "Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Impor Baja Galvalume Antara Indonesia Dan Vietnam" JOM FISIP Vol. 7: Edisi I

Berdasarkan Tabel di atas, pangsa pasar ketiga negara pengimpor utama baja *galvalume* mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan pangsa pasar tahun 2008. Tercatat bahwa produk baja *galvalume* yang dimaksud paling banyak diimpor dari Vietnam dengan andil 60,04%. Peningkatan pangsa pasar untuk negara Vietnam yaitu sebesar 11,45%.

Bahan baku produk *galvalume* ini diperoleh dari Industri Dalam Negeri yaitu PT. NS BlueScope Indonesia dan PT. Sunrise Steel sebagian lainnya diimpor, yaitu antara lain dari Vietnam, Taiwan, Korea selatan.⁴

Kerangka Teori

a. Perspektif Merkantilisme

Pandangan merkantilisme, negara harus mengontrol dan mempengaruhi secara langsung kegiatan perekonomian suatu negara demi terpenuhinya kepentingan nasional dan merkantilisme merupakan konflik kepentingan nasional dimana kebijakan suatu negara adalah sesuatu yang merugikan bagi negara lain. salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perspektif ini adalah Friedrich List,⁵ dalam kekuatan teori produksinya ia menjelaskan bahwa kemampuan menghasilkan lebih penting dari pada hasil produksi. Dengan kata lain, kekuatan negara

tidak tergantung pada banyaknya kekayaan tetapi pada upaya negara tersebut dalam meningkatkan produksinya.

Negara akan berhasil jika negara itu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negerinya dengan meningkatkan produksi dan meminimalisir impor dengan cara proteksi ekonomi dan kebijakan impor.⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa merkantilisme adalah pandangan yang memandang bahwa negara adalah actor utama yang akan selalu meningkatkan perekonomiannya dalam hal mencapai kepentingan nasionalnya.

Perspektif merkantilisme menyatakan bahwa negara berfungsi membuat kebijakan yang akan meningkatkan power dan kekayaan negara, saat ini kebijakan merkantilisme dijalankan dalam bentuk kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi nasional.⁷ Hal ini dapat dilihat dari impor baja Vietnam ke Indonesia karna pasar baja Indonesia dibanjiri baja impor dimana pemerintah berupaya menggenjot produksi dalam negeri dengan memberikan insentif dan membuat kebijakan dalam upaya tindakan pengamanan perdagangan (*safeguards*) terhadap impor baja.

b. Tingkat Analisa

Asumsi dari tingkat analisa Negara-bangsa ini adalah bahwa semua pembuatan keputusan dimanapun berada pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017 "*Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Atas Importasi produk Canai Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dengan Nomor Hs. 7210.61.11.00*".

<http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/laporan%20akhir%20hasil%20penyelidikan%20versi%20tidak%20rahasia.pdf>, Diakses Pada 03 Desember 2020, 22:50 WIB.

⁵ Robert Jackson and George Sorensen, 2005 "*Pengantar Studi Hubungan Internasional*", (Pustaka Pelajar : Yogyakarta).

⁶ Robert Gilpin, 2001 "*Global political economy: understanding the internasional economic order*" (Princeton university press).

⁷ Hamdan Hadi, 2009 "*Ekonomi Internasional*": Edisi revisi, (Bogor: Ghalia Indonesia).

sama sehingga analisa harus ditekankan pada negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Berdasarkan uraian diatas, tingkat analisa negara-bangsa bermamfaat untuk menganalisis Kepentingan Indonesia memberlakukan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) perdagangan terhadap impor baja dari vietnam.

c. Teori Proteksionisme

Teori proteksionisme ini dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan Indonesia memberlakukan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor baja dari vietnam. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor.⁸Indonesia sebagai salah satu negara penghasil baja tentu akan melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (*infant industry*) dari persaingan baja impor.

Untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara maka sebuah negara perlu untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Kebijakan yang diterapkan harus memenuhi semua kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional negaranya. Meminjam istilah Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani foreign policy merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap, arah serta sasaran untuk 10 mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.⁹

⁸ Diakses dari www.beacukai.go.id pada tanggal 7 September 2020, 14:08 WIB

⁹ Anak Agung Banyu Perwita, dan Yanyan Mochammad Yani, 2006 "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

HASIL PEMBAHASAN

Hubungan Bilateral Indonesia dan Vietnam

a. Hubungan Ekonomi

Hubungan kerjasama dibidang ekonomi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam di dasarkan pada persetujuan kedua belah pihak pada tanggal 21 November 1990 dan telah di perbaharui pada tanggal 10 Nopember 2001. Dengan total perdagangan Indonesia dan Vietnam pada tahun 2004 sebesar USD 644 juta atau menurun sebesar 16,3% dibandingkan dengan tahun 2003. Sedangkan jika dibandingkan dengan total perdagangan 2005 (januari s/d juli) sebesar USD 278,9 juta atau mengalami penurunan relatif kecil di bandingkan dengan tahun 2004.

Nilai eskpor pada tahun 2004 USD 360,6 juta atau meningkat sebesar 8,8% jika di bandingkan dengan tahun 2003. Nilai ekspor tahun 2005 (januari s/d juli) sebesar USD 192,6 juta atau turun 10,18% apabila di bandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004. Nilai impor tahun 2004 mencapai 303,3 juta atau menurun 34,4% apabila di bandingkan dengan tahun 2003. Nilai impor tahun 2005 (januari s/d juli) sebesar 86,2 juta menurun 50,9% apabila di bandingkan dengan tahun 2004.¹⁰

PERLINDUNGAN INDUSTRI BAJA DALAM NEGERI

1. Dominasi Impor Baja Galvalume Vietnam di Pasar Indonesia

Industri baja jenis *galvalume* di Indonesia mengalami peningkatan dari Vietnam pada tahun 2009-2012 dan menjadi ancaman bagi pasar industri baja dalam negeri. Hal ini menjadikan

¹⁰ Efan Setiadi, 2016. "*Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Vietnam*" International & Diplomacy Vol.2 No 1 di akses 5 september 2021 Pukul 03:42 WIB

produk dalam negeri mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan produksi menurun dan tenaga kerja tidak dapat dioptimalkan sepenuhnya.

IISIA (Indonesian Iron Dan Steel Industry Association) sebagai wadah bagi pengusaha industri baja di Indonesia melaporkan ke kementerian melalui KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia). Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan industri dalam negeri dari ancaman kerugian dan banjirnya baja impor di Indonesia. Setelah dilaporkan dan di tindak lanjuti oleh KPPI bahwa terbukti adanya lonjakan impor dan ancaman kerugian bagi industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia memberlakukan BMTP sebagai bentuk upaya perlindungan industri baja dalam negeri yang sesuai kesepakatan yang di sahkan oleh WTO, tindakan yang di lakukan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang di lakukan untuk melindungi industri baja dalam negeri.

**KEPENTINGAN INDONESIA
MEMBERLAKUKAN KEBIJAKAN
BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN (BMTP)
PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR
PRODUK BAJA GALVALUME**

Indonesia menerapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau *Safeguard* terhadap impor baja jenis *galvalume* atau baja lapis aluminium seng dengan kode HS 7210.61.11 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137.1/PMK.011/2014. Untuk melindungi industri baja dalam negeri dari ancaman banjirnya baja impor yang di buktikan dalam penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Kebijakan yang diberlakukan tersebut merupakan usulan dari KPPI dan telah melakukan

penyelidikan lapangan dan di sah oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137.1/PMK.011/2014.

Hubungan sebab akibat terhadap pemberlakuan BMTP terhadap produk baja galvalume karna adanya bukti lonjakan volume impor dan terjadi kerugian yang di alami industri baja dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Kerugian yang di alami industri dalam negeri yang di buktikan melalui penyelidikan KPPI merupakan suatu indikator hubungan sebab akibat untuk menentukan kerugian yang diakibatkan lonjakan volume impor dan dapat dilihat berdasarkan data pemohon dari faktor perubahan kinerja perusahaan seperti ketentuan yang telah ditetapkan oleh WTO.

Kementerian Perdagangan menetapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan dengan kode HS 7210.61.11.00 dengan kriteria produk yang dikenai BMTP tersebut adalah yang memiliki lebar 600 mm atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dan ketebalan sampai dengan 0,7 mm.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut diundangkan pada 15 Juli lalu di dalam Berita Negara Republik Indonesia No.978/2014. Pengenaan BMTP terbagi dalam 3 periode yang berlaku sejak 2014-2017. Besaran BMTP yang diberlakukan akan mengecil secara bertahap setiap tahunnya.

Tahun pertama pemberlakuan BMTP berlangsung selama 22 Juli 2014-21 Juli 2015 senilai Rp4.998.784/ton. Tahun kedua berlaku selama 22 Juli 2015-21 Juli 2016 dengan besaran Rp4.314.161/ton, sedangkan tahun ketiga berlaku untuk periode 22 Juli 2016-21 Juli 2017 dengan besaran BMTP sejumlah Rp3.629.538/ton. Berdasarkan hasil penyelidikan tindakan pengamanan

perdagangan, terbukti bahwa terjadi lonjakan volume impor secara absolut selama 2008-2012. Trennya sebesar 42%, atau dari volume 79.279 ton pada 2008 menjadi 251.315 ton pada 2012.

Berdasarkan data KPPI, pada 2012 tercatat bahwa produk produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan yang dimaksud paling banyak diimpor dari Vietnam dengan andil 60,04%. Lonjakan jumlah impor produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan membanjiri pasar domestik. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan suplai, penurunan pangsa pasar produk dalam negeri, dan penurunan keuntungan. Kami membuktikan terdapat hubungan sebab akibat antara lonjakan volume impor dengan ancaman kerugian serius.

SIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan data penyelidikan KPPI adanya bukti lonjakan impor baja *galvalume* yang terjadi di Indonesia dan menyebabkan terjadinya kerugian serius oleh industri baja dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang impor. Kerugian yang di alami industri baja dalam negeri benar berdampak terhadap produksi baja dalam negeri yang di buktikan dengan faktor perubahan kinerja perusahaan.

Dengan terjadinya lonjakan impor pemerintah Indonesia sebagai wadah bagi industri dalam negeri yang mempunyai fungsi regulasi yang mengatur jalannya perekonomian dalam negeri yang mengedepankan kepentingan rakyat dan terciptanya kompetisi yang adil dan kenyamanan bagi pelaku industri dalam negeri di tengah banjirnya impor yang tentunya menjadi ancaman bagi pelaku industri. Impor baja *galvalume* dari tahun 2008-2012 mayoritas dari Vietnam yang di buktikan melalui penyelidikan oleh KPPI.

Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau *Safeguards* melalui PMK *NOMOR 137.1/PMK.011/2014 dengan kode HS 7210.61.11* yaitu produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan mengecualikan 120 negara. Kebijakan BMTP adalah tindakan yang di berikan negara importir kepada negara eksportir akibat terjadinya lonjakan impor.

Tujuan diberlakukan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau *Safeguards* oleh pemerintah Indonesia ini sebagai bentuk instrumen atau proteksi terhadap industri baja galvalume dalam negeri agar terhindar dari ancaman kerugian serius yang di alami pemohon yang memproduksi barang sejenis. Dan untuk menciptakan perdagangan yang adil sehingga produsen baja *galvalume* dalam negeri mampu bersaing dengan barang impor di Indonesia.

Setelah diberlakukan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan upaya pemerintah Indonesia menekan impor baja *galvalume* yang dapat dilihat dari perubahan pangsa pasar negara asal impor utama dari sebelum penerapan BMTP dan setelah penerapan BMTP mengalami penurunan dan dapat melindungi industri baja nasional yang memproduksi barang sejenis.

Daftar Pustaka

- Deliarnov. 2006“ *Ekonomi Politik* “, (Jakarta: Erlangga).
- Jackson, Robert and George Sorensen. 2005 “*Pengantar Studi Hubungan Internasional*”, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta).
- Giplin, Robert. 2001 “*Global political ekonomi: understanding the*

- internasional economic order*" (Princeton university press).
- Landretch, dan Colander, 2001(dalam Jhon T Rouke).
- Hamdan, Hadi. Ekonomi Internasional: Edisi revisi,(Bogor: Ghalia Indonesia. 2009).
- Widiyanto, Suhud. 2019 "*Peramalan nilai impor besi baja indonesia 2008-2017dengan model arima*" Jurnal Manajemen, Vol. 11 (2).
- Maryanto, Ade. 2020 "*Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Impor Baja Galvalume Antara Indonesia Dan Vietnam*" JOM FISIP Vol. 7: Edisi I.
- Samuel, Richard dan dkk. 2017 "*Gugatan Vietnam Kepada Indonesia Terkait Safeguards Produk Canai Lantainya Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan*" Volume 6, Nomor 2.
- Kawabata, Nozomu 2018 "*Development of the Vietnamese Iron and Steel Industry under International Economic Integration*" Graduate School Of Economics And Management Tohoku University Discussion Paper No 396.
- Risnain, Muh. 2011 "*Politik Hukum Perlindungan Industry Dalam Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas*". Jurnal Ilmu Hukum Vol.5,No.3. Universitas Mataram.
- Purwito, ali. 2010, "*Kepabean dan Cukai (pajak lalu lintas barang) konsep dan aplikasi*" Jakarta: Kajian Hukum Fiscal FHUI, Universitas Indonesia, hal. 306.
- Diah, Dini Wati. 2015 "*Motivasi Indonesia Menerapkan Kebijakan Anti Dumping Terhadap Impor Baja Cold Rolled Coil (Crc) Jepang Tahun 2013*", Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
- Kementrian Perindustrian, Data Ekspor Impor Besi Baja Code HS 7210 Periode 2009-2018: <https://kemenperin.go.id/jawaban.php?id=38767-37478>.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2017 "*Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Atas Importasi produk Canai Lantainya Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dengan Nomor Hs. 7210.61.11.00*". <http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/laporan%20akhir%20hasil%20penyelidikan%20versi%20tidak%20rahasia.pdf>.
- KPPI, Laporan Akhir Penyelidikan Atas Importasi Produk Baja Paduan, Diakses dari: <http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/laporan%20akhir%20hasil%20penyelidikan%20versi%20tidak%20rahasia.pdf>
- Andi M. Arif, 2019 "*Bea Masuk Tindakan Pengamanan BMAD cenderung dongkrak ongkos produksi*". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190514/257/922196/bea-masuk-tindakan-pengamanan-bmad-cenderung-dongkrak-ongkos-produksi>
- Septina Tri Hartati, Analisis Strategi PT Krakatau Steel Dalam Menghadapi Persaingan ProdukBaja. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- E. Atmadji, Pengertian tentang baja
“*Analisis Impor Indonesia*” Jurnal
Ekonomi Pembangunan.
[http://eprints.umg.ac.id/1991/3/BAB%
20II.pdf](http://eprints.umg.ac.id/1991/3/BAB%20II.pdf)